

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Peran dan Fungsi BPD

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Krendowahono memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Fungsi legislasi diwujudkan melalui proses perancangan dan pengesahan peraturan desa seperti APBDes, yang menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance). Di Krendowahono, BPD juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan desa dan penggunaan dana desa. Namun, efektivitas pelaksanaan kedua fungsi tersebut di desa ini mengalami kendala karena rendahnya kapasitas anggota BPD dalam memahami regulasi dan aspek hukum yang berlaku. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan penyaluran aspirasi masih terbatas, menunjukkan adanya kesenjangan antara BPD dan warga desa.

2. Kendala yang Dihadapi BPD

Badan Permusyawaratan Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, menghadapi beberapa kendala utama dalam menjalankan tugasnya, antara lain keterbatasan sumber

daya manusia, akses terhadap informasi, serta dinamika hubungan yang kurang harmonis dengan pemerintah desa. Keterbatasan ini mempengaruhi efektivitas BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi. Untuk mengatasi kendala ini, perlu ada peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi anggota BPD, serta penguatan kolaborasi antara BPD dan pemerintah desa. Peningkatan kolaborasi ini penting untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan kondusif bagi pengawasan dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif di Desa Krendowahono.

B. Saran

1. Pengembangan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan yang komprehensif akan meningkatkan kompetensi BPD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota BPD diharapkan dapat memperbaiki efektivitas pelaksanaan tugas dan kontribusi mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Transparansi dalam penyampaian informasi akan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Akses yang memadai terhadap informasi penting akan memungkinkan BPD untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan legislasi dengan lebih akurat dan efisien.
3. Komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis antara BPD dan pemerintah desa merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan

pemerintahan desa yang sukses. Forum komunikasi yang terstruktur dapat mengurangi ketegangan, memperbaiki hubungan kerja, dan meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

4. Pemerintah desa, bersama dengan BPD, harus mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya dari kelompok-kelompok yang kurang terwakili. Ini dapat mencakup penyelenggaraan forum warga, konsultasi publik yang lebih intensif, dan mekanisme inklusif lainnya.
5. Dilakukan evaluasi berkala terhadap kinerja BPD dan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil evaluasi ini harus digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan dalam praktik dan prosedur BPD.